



Matra Pembaruan

Jurnal Inovasi Kebijakan

VOLUME 2 | NO 3 | NOVEMBER 2018

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Matra Pembaruan (MP) merupakan jurnal yang menyediakan sumber informasi ilmiah yang ditujukan untuk peneliti, lembaga penelitian, instansi pemerintah, dan pemangku kepentingan. Jurnal tersebut menerbitkan manuskrip penelitian asli yang berfokus pada hasil penelitian tentang inovasi kebijakan pemerintah

TERBITAN

MP diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Dalam Negeri dan diterbitkan tiga kali dalam setahun yaitu Maret, Juli, November.
ISSN cetak: 2549-5151
ISSN elektronik: 2549-5283
Edisi elektronik tersedia di:
www.matrapembaruan.com

PENGELOLAAN ARTIKEL

Setiap artikel yang dikirim ke MP harus menggunakan perangkat lunak manajemen referensi seperti **EndNote™** dan **Mendeley**. Artikel bahasa Inggris yang diterima redaksi untuk dipublikasikan di MP akan dibuktikan dengan menggunakan perangkat lunak tata bahasa **Grammarly®**.

BIAYA PENERBITAN ARTIKEL

Setiap artikel yang dikirimkan ke MP tidak dikenakan biaya apa pun. Termasuk dalam hal penilaian oleh Mitra Bebestari, pengeditan, penerbitan, pemeliharaan, dan pengarsipan.

ALAMAT

Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri
Jl. Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat, Indonesia
Nomor Telepon/Fax: +62 21 391 3201
Email: matrapembaruan@gmail.com





Matra Pembaruan

Jurnal Inovasi Kebijakan

VOLUME 2 | NO 3 | NOVEMBER 2018

PEMIMPIN REDAKSI

Andjar Prasetyo
Politik dan Pemerintahan
andjar.prasetyo1@gmail.com

REDAKSI PELAKSANA

Lita Dewi Wulantika
litadeewi@yahoo.com

M. Saidi Rifky
saidirifky@gmail.com

Frisca Natalia Hutabarat
frisca212@gmail.com

DEWAN REDAKSI

Joko Tri Haryanto
Kebijakan Fiskal
djihar78@gmail.com

Vishnu Juwono
Administrasi Negara
vjuwono@ui.ac.id

Moh. Ilham A Hamudy
Politik dan Pemerintahan
ilhamhamudy80@gmail.com

EDITOR BAHASA

Moh. Ilham A Hamudy
ilhamhamudy80@gmail.com

M. Saidi Rifky
saidirifky@gmail.com

GRAFIS

M. Saidi Rifky
saidirifky@gmail.com

UCAPAN TERIMA KASIH UNTUK MITRA BEBESTARI

Yusa Djuyandi
Ilmu Pemerintahan
yusa.djuyandi@unpad.ac.id

Caroline Paskarina
Politik dan Pemerintahan
caroline.paskarina@unpad.ac.id

Slamet Rosyadi
Department of Public Administration
(MAP)
Universitas Jenderal Soedirman
Jl. HR. Bunyamin 708, Grendeng Purwokerto 53122 Jawa Tengah
INDONESIA
slametrosyadi72@gmail.com

Istiqomah
Ilmu Ekonomi
Universitas Jenderal Soedirman
Kampus Grendeng, Purwokerto-53122,
INDONESIA
iisms@yahoo.com

Carunia Mulya Firdausy
Economics Faculty of Economics
University of Tarumanagara,
Jl. Tanjung Duren Utara V No.1,
West Jakarta, Jakarta 11470
INDONESIA
cmfirdausy@gmail.com

Halaman ini sengaja dikosongkan



Matra Pembaruan

Jurnal Inovasi Kebijakan

VOLUME 2 | NO 3 | NOVEMBER 2018

PENGANTAR REDAKSI

Volume 3 No 6 merupakan edisi pelengkap penerbitan Jurnal Matra Pembaruan (MP) selama dua tahun. Itu artinya MP akan memasuki tahap akreditasi jurnal nasional pada 2019 mendatang. Dengan status akreditasi, nantinya akan meningkatkan kepercayaan para peneliti untuk menulis di jurnal ini.

Dua tahun bukan hal yang mudah mengelola yang terbilang baru ini. Beberapa kali MP sempat mengalami keterlambatan penerbitan akibat kekurangan naskah. Pengelola juga harus meyakinkan beberapa peneliti internal untuk menulis di MP. Dengan begitu MP bisa terbit secara konsisten. Penerbitan pelengkap ini menjadi momentum redaksi untuk mengevaluasi pengelolaan selama dua tahun ke belakang. Dengan evaluasi diharapkan pengelolaan MP selanjutnya bisa lebih baik dan berkualitas.

Sementara itu, pada edisi kali ini, MP memuat 6 artikel yang di antaranya; Analisis Tingkat Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Bogor; The Effect of Government Regulation on Coal as Export Commodities and Downstream Effort Through Coal Liquefaction (Systems Dynamic Modelling Approach); Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Konservasi Energi untuk Efisiensi Energi di Sektor Penerangan Jalan Umum (PJU); Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Membangun Smart City di Kota Medan; Implementation of Allocation of Village Funds (ADD) Increases Institutional and Ngombakan Village Development Programs Manifest Good Governance; Tipologi Inovasi Sektor Publik (Inovasi Program Si-Cakep) di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Kami berharap, keenam artikel yang disajikan dalam MP di edisi kali ini dapat bermanfaat bagi khalayak pembaca. Terima kasih.

Jakarta, November 2018

Pemimpin Redaksi



Matra Pembaruan

Jurnal Inovasi Kebijakan

VOLUME 2 | NO 3 | NOVEMBER 2018

DAFTAR ISI

Analisis Tingkat Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Bogor <i>Sitti Aminah, Hari Prasetyo Sutanto</i>	149-160
The Effect of Government Regulation on Coal as Export Commodities and Downstream Effort Through Coal Liquefaction (Systems Dynamic Modelling Approach) <i>Yudianto, Joko Tri Haryanto</i>	161-172
Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Konservasi Energi untuk Efisiensi Energi di Sektor Penerangan Jalan Umum (PJU) <i>Melati Ayuning Pranasari, Ray Ferza</i>	173-183
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Membangun Smart City di Kota Medan <i>Adi Suhendra, Arwanto H. Ginting</i>	185-195
Implementation of Allocation of Village Funds (ADD) Increases Institutional and Ngombakan Village Development Programs Manifest Good Governance <i>Taufiqurokhman, Andriansyah</i>	197-206
Tipologi Inovasi Sektor Publik (Inovasi Program Si-Cakep) di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan <i>Yayuk Basuki, Rulinawaty Kasmad, Nasrulhaq</i>	207-216



Matra Pembaruan

Jurnal Inovasi Kebijakan

VOLUME 2 | NO 3 | NOVEMBER 2018

HALAMAN INTISARI

e-ISSN: 2549-5283

p-ISSN: 2549-5151

Tanggal Edisi: November 2018

Halaman intisari ini boleh diperbanyak atau dicopy tanpa izin redaksi dan penulis

DDC 307.72

Sitti Aminah¹, Hari Prasetyo Sutanto², (^{1,2} Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. Jl. Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat, Indonesia)

Analisis Tingkat Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Bogor

Matra Pembaruan, November 2018, vol. 2, no 3, p. 149-160, 0 ill, 11 tab, 16 ref.

Minimnya kapasitas aparatur desa menyebabkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat belum berjalan optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kapasitas aparatur pemerintah desa pada aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan analisis deskriptif-kausalitas. Data dikumpulkan pada bulan Agustus dan September 2016 di Kabupaten Bogor dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Hasil analisis menyimpulkan kapasitas aparat desa tergolong cukup namun belum optimal mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Peningkatan kapasitas ini dapat dilakukan melalui penambahan intensitas, memperpanjang waktu dan pedalaman materi, disertai praktik secara teknis dalam perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan dalam diklat. Peningkatan pendampingan (melalui pelibatan pendamping Desa dan Lembaga Pemerhati Desa) juga diperlukan disamping meningkatkan intensitas sosialisasi UU Desa dan peraturan pelaksanaannya.

(Author)

Kata Kunci: Kapasitas, Aparat, Pemerintahan Desa

DDC 553.2

Yudianto¹, Joko Tri Haryanto², (¹ Master of Economics in Planning and Public Policy, Faculty of Economics and Business, University of Indonesia ; ² Center for Climate Change Financing and Multilateral Policy, Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance)

The Effect of Government Regulation on Coal as Export Commodities and Downstream Effort Through Coal Liquefaction (Systems Dynamic Modelling Approach)

Matra Pembaruan, November 2018, vol. 2, no 3, p. 161-172, 12 ill, 8 tab, 10 ref.

On one hand, coal is still treated as an export commodity. On the other hand, the government is expecting additional value from the coal sector, among other, through coal liquefaction. The role of the government has been demonstrated through regulation, but there have been no concrete results to realize the downstream effort of coal. To find out to what extent is the optimum coal composition between the coal exported as commodity and coal used for liquefaction, it is analyzed by systems dynamic modeling method in several scenarios. The results show that there are several scenarios that suitable as Government alternative by fine-tuning the royalty instrument and the portion of state revenue. Scenario II could plausibly be the best proposal that is to seek coal for downstream effort through liquefaction in order to liquefy the coal by 50%, while still allocating the remaining portion for the sale of coal as a commodity. This is reinforced because factually there is portion of coal as a commodity being sold domestically as fuel of power plant (PLTU). In Scenario II, coal liquefaction begins to provide a positive cumulative cash flow difference to the baseline after assuming a pre-set condition of royalty at 0% and the state revenue portion in the range of 60% - 80%. The imposition of a royalty of 5% can still be maintained, provided that it remains collaborated with a decrease in the portion of state revenue. This is because the decline in the portion of state revenue is very significant in increasing the cumulative cash flow of coal liquefaction. The state revenue portion can be installed in the range of 60% - 70% on the grounds that this coal liquefaction activity is a process of increasing the value-added that has an impact on the economy.

(Author)

Kata Kunci: Commodity, Downstream, Coal Liquefaction, Systems Dynamic, Cash Flow

DDC 337.1

Melati Ayuning Pranasari¹, Ray Ferza², (^{1,2} Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri, Jl. Kramat Raya No. 132 – Senen, Jakarta)

Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Konservasi Energi untuk Efisiensi Energi di Sektor Penerangan Jalan Umum (PJU)

Matra Pembaruan, November 2018, vol. 2, no 3, p. 173-183, 1 ill, 0 tab, 15 ref.

Pelaksanaan konservasi energi untuk efisiensi energi dan Penerangan Jalan Umum (PJU) belum berjalan secara optimal. Beberapa studi terdahulu telah mengemukakan opsi teknologi dan kebijakan ekonomis bagi pelaksanaan konservasi energi untuk efisiensi energi di sektor Penerangan Jalan Umum. Sementara untuk memperkuat kebijakan efisiensi energi, Pemerintah mempunyai kebijakan kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan permasalahan kebijakan KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) Konservasi Energi untuk Efisiensi Energi sektor PJU. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kajian ini menghasilkan simpulan sebagai berikut. Dalam pelaksanaannya, kebijakan KPBU konservasi energi untuk efisiensi energi dan PJU telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan terbukti mampu mengurangi beban pemerintah daerah dalam pembiayaan pengelolaan PJU khususnya efisiensi biaya/anggaran PJU dalam APBD. Pelaksanaan kebijakan KPBU konservasi energi masuk ke dalam kategori kerja sama yang bersifat kompleks karena mekanisme pembayaran jasa efisiensi energi berdasarkan pada kinerja/pembayaran dari penghematan (payment from saving), Pemerintah tidak menanggung biaya di awal (zero investment) dan tidak menanggung risiko kerugian negara (zero risk). Badan usaha yang akan menanggung risiko kerugian finansial akibat implementasi teknis apabila tidak dapat membuktikan adanya penghematan. Adapun permasalahan kebijakan KPBU yang mengemuka antara lain masih adanya kekosongan pedoman teknis terkait dengan pelaksanaan KPBU atas prakarsa badan usaha konservasi energi untuk efisiensi energi dan PJU, dalam skema KPBU unsolicited project hingga saat ini belum ditemukan adanya aduan potensi/indikasi kerugian keuangan negara karena sejauh ini masih memenuhi azas kehati-hatian.

(Author)

Kata Kunci: Kerja sama, pemerintah daerah, KPBU, Konservasi Energi, Penerangan Jalan Umum

DDC 608.7

Adi Suhendra¹, Arwanto H. Ginting², (¹ Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri. Jl. Kramat Raya No. 132 – Senen, Jakarta, ² Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Jl. Ir. Soekarno KM 20 Jatininggor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat)

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Membangun Smart City di Kota Medan

Matra Pembaruan, November 2018, vol. 2, no 3, p. 185-195, 1 ill, 0 tab, 14 ref.

Penelitian ini adalah tentang kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan smart city di Kota Medan, Sumatera Utara. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di pemerintah daerah sebagai cara untuk meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang baik (Good Governance). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran organisasi pemerintahan daerah (OPD) dalam mengkoordinasikan smart city pada tingkat kota. Kedua, untuk memetakan tugas dan fungsi masing masing OPD, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Pengambilan data dilakukan dengan melakukan observasi terlibat (participant observation), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan dan gambar untuk menghasilkan bukti atau data yang berbeda. Sedangkan pengolahan data peneliti melakukan reduksi data. Hasil yang di dapatkan dalam penelitian ini adalah dalam pengelolaan dan pengembangan smart city di Kota Medan, pemerintah kota telah mengeluarkan peraturan Walikota Medan No 28 tahun 2018 tentang Smart City Kota Medan. Urgensi pembentukan perwali itu didasarkan pada pengembangan dan sinergitas dari seluruh potensi dan sumber daya secara terintegrasi. Tidak hanya itu, pemerintah Kota Medan juga telah membuat master plan peta jalan pembangunan smart city untuk membangun keterpaduan antar OPD. Adapun kendala dalam mewujudkan smart city adalah belum meratanya infrastruktur dan sumber daya manusia untuk memanfaatkan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dalam proses tata kelola dan pelayanan publik. Namun demikian, berbagai upaya dalam mengatasi kendala juga telah di persiapkan dengan memperhatikan infrastruktur aplikasi; sumber daya manusia; infrastruktur jaringan; infrastruktur informasi, integrasi jaringan, informasi dan aplikasi; pendanaan; struktur organisasi, sistem manajemen dan proses kerja untuk tata kelola yang lebih baik.

(Author)

Kata Kunci: Smart City, Pemanfaatan Informasi dan Teknologi, Inovasi Kebijakan, Pemerintahan Daerah.

DDC 352.4

Taufiqurokhman¹, Andriansyah², (^{1,2} Faculty of Social and Political Sciences, University of Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Jakarta)

Implementation of Allocation of Village Funds (ADD) Increases Institutional and Ngombakan Village Development Programs Manifest Good Governance

Matra Pembaruan, November 2018, vol. 2, no 3, p. 197-206, 1 ill, 1 tab, 25 ref.

So far the implementation of the Village Fund Allocation (ADD) has not strengthened institutional and Village Development Programs towards good governance. The purpose of this study is to find out the use of village fund allocation in village development, towards clean governance (Good Governance: accountability, transparency and participation) starting from the stages of planning, transparency and accountability. The study used descriptive qualitative research methods. Descriptive study (descriptive study), aims to explain the aspects that are relevant to the observed phenomenon. This study helps researchers to explain the characteristics of the subject under study, examines several aspects of the phenomenon of ADD implementation in strengthening institutions and village programs to realize good governance. Sources of data used in research are primary data, namely data sources obtained directly from original sources without intermediaries. And secondary data sources of research data are obtained indirectly through intermediary media. The results showed that the management of ADD in Ngombakan village was largely accountable, transparent and participatory. Technically there are obstacles in making Regents (Perbub), about Village Fund Allocation (ADD) and management. The impact is the delay in reporting regarding the management of ADD.

(Author)

Keywords: Implementation of Village Fund Allocation, Improvement of Village Development Programs, Good Governance.

DDC 608.7

Yayuk Basuki¹, Rulinawaty Kasmad², Nasrulhaq³, ^{(1,2,3}Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar)

Tipologi Inovasi Sektor Publik (Program Si-Cakep) di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan

Matra Pembaruan, November 2018, vol. 2, no 3, p. 207-216, 0 ill, 0 tab, 14 ref.

Beberapa instansi di Kabupaten Wajo telah membuat berbagai inovasi dalam rangka merealisasikan kebijakan pemerintah "one agency one innovation. Salah satu inovasi kepegawaian yang diunggulkan di Kabupaten Wajo adalah inovasi keluaran dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yaitu aplikasi Mobile SI-CAKEP. Aplikasi ini merupakan aplikasi baru namun telah masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Nasional. Aplikasi Mobile SI-CAKEP bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu, tujuan dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui cara pemerintah dalam membuat sebuah inovasi yang dapat menjadi salah satu inovasi unggulan dalam perbaikan pelayanan publik. Jenis Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif menggunakan jenis penelitian studi kasus yang bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai inovasi yang diterapkan oleh BKPSDM dalam membuat inovasi Mobile SI-CAKEP di Kabupaten Wajo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya inovasi Mobile SI-CAKEP sangat membantu para Aparatur Sipil Negara dalam pemenuhan hak-hak kepegawaian. Hak-hak kepegawaian yang telah terpenuhi melalui aplikasi Mobile SI-CAKEP ini adalah para Aparatur Sipil Negara tidak harus meninggalkan tempat kerjanya cukup dengan membuka aplikasi dan upload berkas-berkas yang dibutuhkan. Keberadaan inovasi Mobile SI-CAKEP memberikan perubahan yang signifikan terhadap pelayanan kepegawaian di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Wajo kearah yang lebih sistematis, berintegritas, cepat, adaptif, berkomitmen, dan lebih profesional.

(Author)

Keywords: Dualisme Kewenangan, Batam, Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi Khusus